

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA  
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) Pada UMKM  
(Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)**

**Skripsi**



Ditulis Oleh :

Nama : Widuri  
Nomor Mahasiswa : 144215000  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Bisnis

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS  
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) Pada UMKM**

**(Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)**

**Skripsi**

**Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**



Nama : Widuri

Nomor Mahasiswa : 144215000

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Bisnis

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widuri

Nomor Mahasiswa : 144215000

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, September 2018

Widuri

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya ALLAH akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Mujadilah 11)

“ Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya ALLAH memudahkan ke jalan menuju surga”.

(HR. Turmudzi)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”.

(Nelson Mandela)

## ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan alat untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan UD. FFI Sadel dengan SAK ETAP.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara memaparkan penyajian laporan keuangan UD. FFI Sadel bulan januari 2018 dan membandingkan laporan keuangan UD. FFI Sadel dengan SAK ETAP dan menarik kesimpulan tentang penerapan SAK ETAP dengan penyajian laporan keuangan UD. FFI Sadel.

Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa pada neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas sudah sesuai dengan SAK ETAP. Laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP karena dalam laporan laba rugi tidak dicantumkan beban pajak dan laporan keuangan yang belum lengkap karena tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan keuangan, UMKM, SAK ETAP.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucap Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) Pada UMKM (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Keberhasilan menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha.
3. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, Msi selaku ketua Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha.

4. Bapak Drs. Mudasetia Hamid, MM, Akt selaku dosen pembimbing terima kasih atas kesabaran dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmu selama dibangku kuliah sehingga dapat tersusun skripsi ini.
6. Orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya dalam hal apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan kedua ponakanku Carisa dan Azka yang selalu memberikan canda tawanya sebagai penyemangat untuk saya.
7. Pimpinan saya Bapak H. Moch Sodik dan Ibu Hj. Ummu Kulsum yang telah mendukung saya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi.
8. Keluarga Minus sahabat saya selama di bangku kuliah mulai dari awal sampai akhir semester Mami Novi, Kakak Rika, Kakak Riska, Noke Siska yang selalu memberikan semangat, saling membantu dan dukungan satu sama lain.
9. Teman –teman satu bimbingan Mas Hanan, Mas Febrian, Mbak Nursita, Mbak Novi, Mbak Fransiska yang selalu memberikan semangat dan membantu berbagi informasi selama menyelesaikan skripsi.

10. Serta semua pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini namanya tidak dapat saya sebut satu persatu saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan.

*Wassalamu' alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 2018

Widuri

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I .....	1
PANDAHULUAN .....	1
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	10
C Batasan Masalah .....	10
D Tujuan Penelitian .....	11
E Manfaat Penelitian .....	11

BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A Landasan Teori .....	12
1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	12
2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	12
3 Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah .....	14
4 Ruang Lingkup SAK ETAP .....	15
5 Manfaat SAK ETAP .....	16
6 Karakteristik SAK ETAP .....	16
7 Perbedaan SAK ETAP vs PSAK-IFRS .....	18
8 Definisi Laporan Keuangan .....	19
9 Tujuan Laporan Keuangan .....	19
10 Penyajian Laporan Keuangan .....	20
11 Posisi Keuangan .....	20
12 Kinerja Keuangan .....	21
13 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan .....	23

14 Pengakuan dalam Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP .....	24
15 Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP .....	25
16 Kepatuhan terhadap SAK ETAP .....	41
17 Proses (Siklus) Akuntansi .....	41
18 Peranan Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP pada UMKM .....	41
B Penelitian Terdahulu .....	42
BAB III .....	49
METODE PENELITIAN .....	49
A Jenis Penelitian .....	49
B Sumber Data .....	49
C Teknik Pengumpulan Data .....	50
D Subyek Penelitian .....	51
E Instrumen Analisis Data .....	51
F Teknik Analisis Data .....	51
BAB IV .....	54

DATA DAN PEMBAHASAN .....	54
A Profil UMKM .....	54
B Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	55
C Kendala Penyusunan Laporan Keuangan .....	56
D Data dan Pembahasan .....	57
1 Elemen – Elemen Laporan Keuangan .....	57
2 Penyusunan Laporan Keuangan .....	61
BAB V .....	70
KESIMPULAN .....	70
A Kesimpulan .....	70
B Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	74

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 ..... 75

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha, karena dengan wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri dan dengan wirausaha akan membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang diciptakan tersebut. Karena hakikat setiap usaha didirikan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan masing-masing usaha secara umum dapat dikatakan sama, hanya prioritasnya yang berbeda (Saptantinah, 2010).

Menurut Suhairi (2004) menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinegara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setiap tahunnya. Tujuan paling utama bagi sebuah

usaha adalah mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin, begitu juga bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mereka memiliki tujuan tertentu selain mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran tenaga kerja di Indonesia.

Pada dasarnya tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu diarahkan dalam pencapaian kestabilan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan menimbulkan persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, sehingga membuat bidang keuangan harus mendapatkan perhatian yang lebih (Floren, Fefri, Ramayani 2013). Dalam bidang keuangan suatu media penting dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Media tersebut berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media informasi yang dapat membantu para pengusaha dalam mendeskripsikan keadaan perusahaannya.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), biasanya tidak tercatat secara sistematis atau dituangkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), hal yang demikian terjadi karena kebanyakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membiayai

sendiri kegiatan usahanya, atau meminjam pada keluarga atau sanak saudara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut memiliki anggapan bahwasannya pencatatan dengan menggunakan sistem akuntansi akan menghabiskan banyak biaya serta sumber daya manusianya yang kurang memadai. Namun hal yang demikian tidak akan dapat dilakukan jika pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan modal dari bank, atau investor yang ingin menanamkan modalnya, serta auditor jika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut memerlukan audit. Maka pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) layak diterapkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga tersaji laporan yang mudah dipahami dan akurat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) berlaku efektif per 1 Januari 2011, namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang :

- (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan,
- (2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.



Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (IAI, 2014).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah yang jumlahnya hampir 90% dari total perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini perusahaan kecil dan menengah tidak perlu menyusun laporan keuangan mereka berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan perlu memahami apa arti dari angka yang ada dalam laporan keuangan dan bagaimana menganalisis serta menafsirkan data keuangan dengan cara yang logis dan sistematis.

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Padahal laporan keuangan adalah hal yang paling esensial bagi pemilik perusahaan sebagai dasar untuk mengembangkan usaha mereka dalam hal pengambilan keputusan.

Suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) butuh pengembangan dalam usaha, yaitu pengembangan dari aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, lingkungan dan keuangan. Dari kelima

aspek tersebut mempengaruhi prospektif suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menerapkan informasi akuntansi untuk mendukung kelima aspek tersebut, tetapi praktek akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Furqon, 2012).

Pada umumnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya memiliki informasi akuntansi yang masih sederhana, bahkan untuk usaha mikro tidak memperdulikan informasi akuntansi seperti pencatatan operasional atau pencatatan beban-beban yang mempengaruhi harga jual suatu barang produksi. Jika hal ini terjadi pada usaha mikro, kecil, menengah maka besar kemungkinan tidak ada perkembangan yang signifikan pada usaha. Sehingga dampak yang terjadi dari tidak adanya informasi akuntansi adalah tidak dapat mengukur kinerja perusahaan, jika usaha akan menjalin mitra dengan lembaga keuangan maka akan mengalami kesulitan.

Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan akuntansi memiliki manfaat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diantaranya untuk pihak eksternal adalah kemudahan mengakses peminjaman kredit pada lembaga keuangan, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pihak internal yaitu dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengevaluasi usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah dijalankan selama tahun periode.

Untuk keperluan perpajakan telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008, bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari empat miliar delapan ratus juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada jenderal pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun bersangkutan. Sehingga bagi wajib pajak yang penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan. Jika wajib pajak tidak memberitahu tentang penyelenggaraan norma perhitungan penghasilan neto maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Begitu juga dengan sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah membayar denda, jika tidak dipenuhi maka mendapat sanksi pidana.

Menurut Sulistiawan (2006) *Statement of the Accounting Principle Board* No. 4 dewan penyusunan Standar Akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang suatu badan usaha untuk pengambilan keputusan ekonomis. Maksudnya akuntansi dapat diartikan sebagai:

- (1) kegiatan jasa;
- (2) akuntansi menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan;

(3) akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis.

Akuntansi terproses dari nilai transaksi yang kemudian dilakukan penjurnalan dan *posting* hingga tersusun menjadi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tersusun dari laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah bahasa bisnis, karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Berdasarkan catatan tersebut selanjutnya dapat disusun laporan keuangan sebagai proses akhir dari kerangka akuntansi (Jusup,2010).

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan keuangan (PSAK,2009). Adapun tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus

kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (SAK ETAP,2013)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berisikan:

(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang - undang ini.

(3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

(4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

(5) Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

UD FFI Sadel adalah termasuk salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat di kota Yogyakarta yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Produk yang dijual adalah cover jok motor. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mewajibkan bagi semua perusahaan khususnya perusahaan mikro kecil dan menengah dalam proses pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan harus mengacu atau berpedoman pada SAK ETAP.

Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan suatu keharusan bagi perusahaan mikro, kecil, menengah untuk mengacu dan berpedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Banyak perusahaan yang belum bisa menerapkan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK ETAP serta standar tersebut jarang

diperkenalkan pada mahasiswa, sehingga kemampuan tentang standar ini jauh dari harapan.

Dalam standar ini, pengakuan dan penilaian telah diatur dengan jelas serta penyajian laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh entitas terdiri dari neraca, laba-rugi, equity dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan diatas diperoleh dari bukti-bukti transaksi, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahami alur dan proses dari laporan keuangan. (Mujairimi,2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel).

### **C. Batasan Masalah**

Agar dapat memberikan penganalisisan yang lebih terfokus maka penulis memberikan batasan masalah penelitian ini hanya pada UMKM UD. FFI Sadel dalam bidang usaha dagang periode tahun 2018.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel).

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi UMKM**

Dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam upaya untuk membenahi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

##### **3. Bagi Penulis**

Sebagai pengetahuan, pengembangan, dan menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan atau UMKM.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A Landasan Teori**

##### **1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

##### **2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengatur kriteria usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Industri kecil Indonesia dibedakan menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja termasuk pengusaha yang bekerja yaitu:

1. Industri yang berskala besar dengan jumlah pekerja paling sedikit 50 orang.

2. Industri yang berskala sedang dengan jumlah pekerja 20 sampai 49 orang.
3. Industri yang berskala kecil dengan jumlah pekerja 5 sampai 19 orang.

### **3. Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah**

Menurut Suryana (2001) fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan barang dan jasa.
- b. Penyerapan tenaga kerja.
- c. Pemeratan pendapatan.
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah.
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat.

#### 4. Ruang Lingkup SAK ETAP

a) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

b) Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

c) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. (IAI,2016)

## 5. Manfaat SAK ETAP

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil, menengah, mampu untuk:

- a. Menyusun laporan keuangan sendiri;
- b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari bank) untuk pengembangan usaha.

2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.

3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

## 6. Karakteristik SAK ETAP

1. SAK ETAP: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

2. ETAP adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan;

- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
3. Menggunakan acuan IFRS untuk *Small Medium Enterprises*.
4. Lebih sederhana antara lain:
  - a. Aset tetap, tidak menggunakan harga perolehan.
  - b. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
  - c. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.
5. Kualitatif informasi dalam laporan keuangan:
  - a. Dapat Dipahami;
  - b. Relevan;
  - c. Materialitas;
  - d. Keandalan;
  - e. Subtansi mengungguli bentuk;
  - f. Pertimbangan sehat;
  - g. Kelengkapan;
  - h. Dapat Dibandingkan;
  - i. Tepat Waktu;
  - j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat.
6. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan

mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

7. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali diisyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

#### **7. Perbedaan SAK ETAP vs PSAK-IFRS**

Menurut Wira (2012) Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK-IFRS antara lain:

- a. Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK-IFRS complicated dan rumit.
- b. SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK-IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
- c. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan.
- d. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.

- e. SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
- f. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
- g. SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model revaluasi.

## **8. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi bankir, kreditor, pemilik, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. (IAI, 2014)

## **9. Tujuan Laporan Keuangan**

SAK ETAP (2016) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya,



laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

#### **10. Penyajian Laporan Keuangan**

Penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP 2016 antara lain:

1. Penyajian Wajar.
2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP.
3. Kelangsungan Usaha.
4. Frekuensi Pelaporan.
5. Penyajian yang Konsisten.
6. Informasi Komparatif.
7. Materialitas dan Agregasi.
8. Laporan Keuangan Lengkap.
9. Identifikasi Laporan Keuangan.

#### **11. Posisi Keuangan**

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang

berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

(a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

(b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

(c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Beberapa pos mungkin memenuhi definisi aset atau kewajiban namun tidak dapat diakui sebagai aset atau kewajiban dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria pengakuan. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari dalam entitas harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

## 12. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba

sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

(a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

(b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal.

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba-rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban. Penghasilan (*income*) meliputi :

(1) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

(2) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

(1) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, kas aset tetap.

(2) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

### **13. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan

beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- (a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

#### **14. Pengakuan dalam Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP (2016), Pengakuan dalam laporan keuangan antara lain:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Penghasilan
4. Beban
5. Laba atau Rugi

## 15. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan tersusun dari posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP meliputi :

### a) Neraca

Neraca Menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Berikut adalah ruang lingkup neraca menurut IAI dalam SAK ETAP Tahun (2016):

**Tabel 2.1**  
**Ruang Lingkup Neraca Menurut SAK ETAP Tahun 2016**

No.	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
A	RUANG LINGKUP	hal.15 P:4.1	Mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode.
B	INFORMASI YANG DISAJIKAN	hal.15 P:4.2	Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

	DALAM NERACA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kas dan setara kas</li> <li>b. Piutang usaha dan piutang lainnya</li> <li>c. Persediaan</li> <li>d. Properti Investasi</li> <li>e. Aset tetap</li> <li>f. Aset tidak berwujud</li> <li>g. Utang usaha dan utang lainnya</li> <li>h. Aset dan kewajiban Pajak</li> <li>i. Kewajiban diestimasi</li> <li>j. Ekuitas</li> </ul>
--	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : SAK ETAP, 2016

**b) Laporan Laba Rugi**

Untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Laporan laba rugi juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Berikut adalah ruang lingkup laporan laba rugi menurut IAI dalam SAK ETAP Tahun (2016):

**Tabel 2.2**  
**Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi Menurut**  
**SAK ETAP Tahun 2016**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
A	RUANG LINGKUP	hal.19 P5.2	Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.
B	INFORMASI YANG DISAJIKAN DILAPORAN LABA RUGI	Hal. 19 P5.3	Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut; (a) pendapatan; (b) beban keuangan; (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode



			<p>ekuitas;</p> <p>(d) beban pajak;</p> <p>(e) laba atau rugi neto.</p>
		P5.4	<p>Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.</p>
		P5.5	<p>Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan</p>

Sumber: SAK ETAP, 2016

### c) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan laba rugi dan saldo laba suatu periode menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Dimana pos-pos minimal mencakup saldo laba pada awal periode pelaporan, pendapatan, beban, bagian laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas, laba atau rugi bersih, dan saldo laba akhir periode pelaporan (total ekuitas). Untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Berikut adalah ruang lingkup laporan perubahan ekuitas menurut IAI dalam SAK ETAP Tahun (2016).

**Tabel 2.3**

**Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas  
Menurut SAK ETAP Tahun 2016**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
A	RUANG LINGKUP	hal.21 P.6.1	Untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu).
B	TUJUAN	P6.2	Laporan perubahan ekuitas

			<p>menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.</p>
C	<p>INFORMASI YANG DISAJIKAN DILAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p>	P6.3	<p>Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:</p> <p>(a) laba atau rugi untuk periode;</p> <p>(b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</p> <p>(c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui;</p>

			<p>(d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berskala dari;</p> <p>(i) laba atau rugi;</p> <p>(ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</p> <p>(iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya kepemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya kepemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.</p>
		P 6.4	<p>Laporan laba rugi dan saldo menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan.</p>

Sumber: SAK ETAP, 2016

#### d) Laporan Arus Kas

Untuk mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan setara bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis perubahan atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut adalah ruang lingkup laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun (2016)

**Tabel 2.4**  
**Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut**  
**SAK ETAP Tahun 2016**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
A	RUANG LINGKUP	P7.1	Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
B	INFORMASI YANG DISAJIKAN	P7.3	Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk

	DALAM LAPORAN ARUS KAS		suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
		7.4	<p>Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;</li> <li>(b) penerimaan kas dari royalti, <i>fees</i>, komisi, dan pendapatan lain;</li> <li>(c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;</li> <li>(d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;</li> <li>(e) pembayaran kas atau restitusi</li> </ul>

			<p>pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;</p> <p>(f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya, yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.</p>
		7.5	<p>Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:</p> <p>(a) pembayaran kas untuk mendapatkan aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka</p>

			<p>panjang lainnya;</p> <p>(b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;</p> <p>(c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam <i>joint venture</i> (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);</p> <p>(d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari <i>joint venture</i> (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);</p> <p>(e) uang muka atau pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;</p> <p>(f) penerimaan kas dari pembayaran</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
		7.6	<p>Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:</p> <p>(a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lainnya;</p> <p>(b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;</p> <p>(c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;</p> <p>(d) pelunasan pinjaman;</p> <p>(e) pembayaran kas oleh <i>lessee</i> untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.</p>

Sumber: SAK ETAP, 2016

### e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut adalah ruang lingkup catatan atas laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun (2016):

**Tabel 2.5**

**Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan  
Menurut SAK ETAP Tahun 2016**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
A	RUANG LINGKUP	P8.1	Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam

			laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
B	STRUKTUR	P8.2	<p>Catatan atas laporan keuangan harus meliputi:</p> <p>(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi;</p> <p>(b) mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan;</p> <p>(c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.</p>
		P8.4	<p>Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) suatu pernyataan bahwa laporan</p>

		<p>keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP</p> <p>(b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.</p> <p>(c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-postersebut.</p> <p>(d) pengungkapan lain.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: SAK ETAP Tahun 2016

### 16. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi persyaratan dalam SAK.

### **17. Proses (Siklus) Akuntansi**

Menurut Harahap (2007) proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Dalam proses pengolahan data menggunakan arus, siklus, atau proses akuntansi yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai pada tahap pelaporan.

### **18. Peranan Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP pada UMKM**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dibuat agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diharapkan laporan yang dimiliki oleh setiap unit usaha memiliki laporan keuangan yang sama dan berguna untuk pihak eksternal perusahaan.

Manfaat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha kecil dan menengah adalah untuk mengembangkan usaha dalam upaya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan perusahaan yaitu melakukan penyajian laporan keuangan sesuai standar yang

telah ditentukan. Karena dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Arri Alfitri, Ngadiman, Sohidin yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa para perajin belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena terkendala dengan kurangnya pengetahuan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan tidak ada tenaga

akuntansi yang profesional kurangnya sosialisasi tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) kepada para perajin .

Menurut Floren Violetfin Leries, Fefri Indra Arza, Citra Ramayani dalam penelitian yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Studi Kasus pada CV. Citra Pandion Bernas di Kabupaten Solok menghasilkan bahwa Penerapan laporan keuangan CV. Citra Pandion Bernas ditinjau berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) belum sepenuhnya dilakukan, selain itu terdapat kendala bahwa tidak adanya pembagian tugas antar bidang dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

Sri Ernawati, Jumirin Asyikin, Octavia sari pada artikel ilmiahnya yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Dasar pada usaha kecil dan menengah di kota Banjarmasin menghasilkan bahwa Penerapan sistem akuntansi di kota Banjarmasin masih kurang, minimnya penerapan sistem akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dikarenakan kurangnya keinginan dari pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan pencatatan atau pembukuan untuk usahanya.

Titik Faridah (2015) dalam penelitian yang berjudul Penyusunan dan Penerapan Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus pada Multi Jaya Atsiri dan UD. Wijaya Kusuma di Blitar) menghasilkan bahwa Multi Jaya Atsiri dan UD. Wijaya Kusuma belum melakukan pencatatan usahanya karena keterbatasan waktu dan kurangnya kesadaran pemilik UKM akan kebermanfaatan laporan keuangan.

Sri Yunawati, Arma Yuliza, Dinarti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Penerapan Pencatatan Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Studi Kasus pada usaha warnet di Kota Tengah. Menghasilkan Kelima warnet tidak membuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku sehingga kelima usaha warnet tersebut tidak mengetahui perkembangan usahanya, tidak mengetahui posisi keuangannya, dan tidak mengetahui perkembangan modal usaha mereka.

**Tabel 2.6**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul	Metode	Hasil
1	Arri Alfitri, Ngadiman,	Penerapan Standar	Deskriptif Kualitatif	Para perajin belum menggunakan SAK ETAP



	Sohidin.	Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten		karena terkendala dengan kurangnya pengetahuan tentang SAK ETAP dan tidak ada tenaga akuntansi yang profesional kurangnya sosialisasi tentang SAK ETAP
2	Floren Violetfin Leries, Fefri Indra Arza,	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan	Kualitatif	Penerapan laporan keuangan CV. Citra Pandion Bernas ditinjau berdasarkan SAK ETAP

	Citra Ramayani	Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Studi kasus pada CV. Citra Pandion Bernas di Kabupaten Solok		belum sepenuhnya dilakukan selain itu terdapat kendala bahwa tidak adanya pembagian tugas antar bidang dan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.
3	Sri Ernawati, Jumirin Asyikin, Octavia Sari	Penerapan Standar Akuntansi Dasar Pada Usaha Kecil, Menengah, di Kota Banjarmasin	Deskriptif Kualitatif	Penerapan sistem akuntansi dikota Banjarmasin masih kurang. Minimnya penerapan sistem akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dikarenakan kurangnya keinginan dari pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan pencatatan

				atau pembukuan untuk usahanya.
4	Titik Faridah	Penyusunan dan Penerapan Laporan Keuangan Usaha Kecil, Menengah Berdasarkan SAK ETAP (Studi kasus pada Multi Jaya Atsiri dan UD. Wijaya Kusuma di Blitar)	Kualitatif	Multi Jaya Atsiri dan UD. Wijaya Kusuma belum melakukan pencatatan usahanya karena keterbatasan waktu dan kurangnya kesadaran pemilik UKM akan kebermanfaatan laporan keuangan.
5	Sri Yunawati, Arma Yuliza, Dinarti	Studi Penerapan Pencatatan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Studi	Deskriptif	Kelima usaha warnet tidak membuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku

		Kasus pada warnet di Kota Tengah.		sehingga kelima usaha warnet tersebut tidak mengetahui perkembangan usahanya, tidak mengetahui posisi keuangannya, dan tidak mengetahui perkembangan modal dan usahan mereka.
--	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STIE Widya Widhana  
 Jangan Plagiat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2013) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat , dan hasil penelitian lebih menekankan induktif makna daripada generalisasi.

Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk memahami gejala yang tampak pada subyek penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang ada sehingga menemukan hasil berupa kesimpulan yang dapat disajikan saran dimasa yang akan datang bagi subyek penelitian terkait.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Sugiono (2013) menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiono (2013) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yaitu UD. FFI Sadel.

## **E. Instrumen Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiono, 2013).

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata – kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data kualitatif menurut Matthew B. Mills dan A. Michael Hubberman (1984) akan melalui proses sebagai berikut:

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

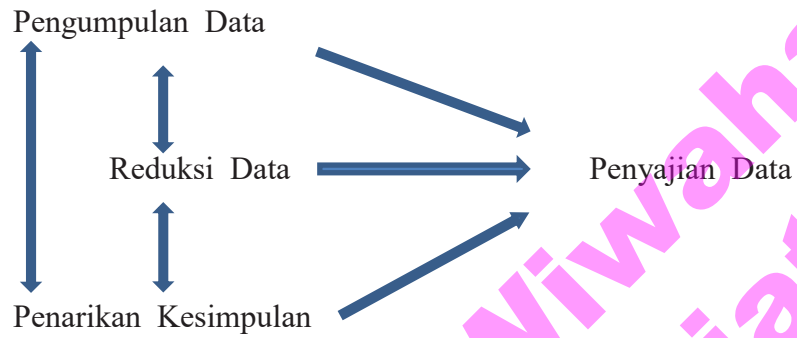
mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Display*) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian maka akan diusahakan membuat berbagai matrik naratif saja. Dalam *display* data ini sangat membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada sipeneliti, sehingga dapat menyajikan data dengan baik

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) yaitu peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proporsisi. Makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.



Ketiga kegiatan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen analisis data, model interaktif dari MatthewB. Milis dan A. Michael Hubberman, (1992:20)

## **BAB IV**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi obyek penelitian ini sudah berdiri sejak tahun 1997, berlokasi di Yogyakarta. Usaha ini dikelola sendiri oleh pemilik dengan dibantu oleh 6 karyawan tetap. Omset yang diperoleh oleh usaha ini setiap bulannya mencapai Rp. 200 juta. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini bergerak dalam usaha dagang, yaitu membeli barang dagangan dan menjual barang dagangannya kembali.

Sejak beroperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sudah mempunyai laporan keuangan. Pemilik hanya melakukan pencatatan mengenai transaksi pembelian barang dagangan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban listrik, pembayaran beban telepon, pembayaran beban asuransi karyawan, pembayaran uang absensi/kehadiran karyawan, pembayaran uang makan karyawan, serta penjualan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan salah satu dari entitas tanpa akuntabilitas publik, karena laporan keuangan yang dimiliki hanya digunakan untuk kepentingan internal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini juga belum mengajukan

pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau bukan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat.

## **B. Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam usaha. Laporan keuangan digunakan sebagai media komunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak lain yang berkepentingan (Silva dan Alwi, 2006 dalam Armando, 2014). Laporan keuangan juga melaporkan histori dari suatu perusahaan dan memberikan dasar prestasi, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan (Weston dan Copeland, 1994 dalam Armando, 2014).

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dalam pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Said, 2009 dalam Rudianto, 2012). Keputusan – keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi –

informasi non akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar. Secara umum pelaku UKM menganggap informasi akuntansi tidak penting, dikarenakan mereka merasa direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi dan yang terpenting mereka mendapatkan laba tanpa dibebani penyelenggaraan akuntansi (Pinasti,2001).

### **C. Kendala Penyusunan Laporan Keuangan**

Berikut beberapa kendala – kendala yang dialami oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Karyawan yang dimiliki tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang akuntansi yang mereka lakukan hanya mencatat jumlah uang masuk dan uang keluar, untuk setiap minggunya oleh pemilik.
2. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang karena pemilik sekaligus menjadi pengelola usaha. Pemilik mengelola usaha sendiri, sehingga waktu yang dimiliki difokuskan untuk mengembangkan usahanya. Karyawan hanya diberikan otoritas untuk mengatasi penjualan barang dagangan.

## **D. DATA DAN PEMBAHASAN**

### **1. Elemen-Elemen Laporan Keuangan**

#### **a. Aset Perusahaan**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dijelaskan bahwa aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tidak lancar/tetap dan aset tidak berwujud. Berdasarkan hasil penelitian pada aset yang ada pada UD. FFI Sadel, maka akan dijelaskan masing-masing aset sebagai berikut:

1. Aset Lancar yang dimiliki oleh UD. FFI Sadel terdiri dari kas ditangan dan kas dibank. Aset lancar berupa kas dinilai sebesar kas akhir yang ada pada UD. FFI Sadel setelah dikurangi pengeluaran yang terjadi selama periode itu. Aset ini diakui dan dicatat sebesar nilai kas akhir dan dicantumkan dalam neraca. Sedangkan kas dibank dinilai sebesar kas yang tertera dalam buku tabungan setelah ditambahkan bunga dan dikurangi beban administrasi bank. Kas dibank ini diakui sebagai kas bersih dan dicatat dalam neraca sebagai aset lancar. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mensyaratkan aset lancar diakui sebesar kas akhir yang belum terpakai atau setelah ditambahkan pendapatan dan dikurangi beban selama periode itu, sehingga yang harus tampak dalam neraca yaitu kas bersih.

2. Aset Tetap yang dimiliki oleh UD. FFI Sadel berupa peralatan kantor. Aset tetap tersebut diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut diterima dan dinilai sebesar kas yang dibayarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan peralatan kantor. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mensyaratkan bahwa aset harus dinilai sesuai dengan harga perolehan atau uang yang dikeluarkan. Akan tetapi, metode penyusutan yang digunakan oleh UD. FFI Sadel sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), karena menggunakan metode garis lurus yang digunakan dalam penyusutan tersebut.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2013) dijelaskan bahwa metode penyusutan yang diakui terdiri dari metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*). Metode diatas dapat dipilih salah satu oleh setiap perusahaan dan harus konsisten dalam penggunaan metode tersebut.

## **b. Kewajiban**

Dalam standar akuntansi yang diterima umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mensyaratkan bahwa kewajiban harus diakui pada saat barang diterima dari pembelian secara kredit atau menerima uang dari pinjaman pada pihak lain. Setiap terjadi transaksi harus dicatat terlebih dahulu dalam catatan harian atau bulanan, agar tidak terjadi kesalahan dalam mencatat transaksi tersebut. Disamping itu, memang suatu kewajiban bagi seorang akuntan yang bekerja dalam perusahaan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi, dan harus ada bukti seperti nota dan lain sebagainya. Transaksi ini akan berpengaruh pada aset lancar, dimana aset tersebut seharusnya bertambah pada saat menerima pinjaman dan pembelian barang secara kredit. Akibatnya aset lancar menjadi kecil sedangkan hutang bertambah, sehingga dampak dari transaksi ini adalah aset berupa kas terlalu kecil dan akan berkurang pada saat kas tersebut digunakan untuk membayar hutang. Akibatnya, pengakuan terhadap kas tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

### **c. Modal**

Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada bagian keuangan dan dibuktikan dengan data. Modal usaha yang diterima tersebut diakui sebagai modal usaha dalam neraca dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterimanya

### **d. Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu perusahaan, karena pendapatan tersebut menjadi target bagi pengelola perusahaan. Pendapatan yang tinggi disertai dengan rendahnya beban yang dikeluarkan selama periode tertentu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Apabila pendapatan rendah dari beban yang dikeluarkan, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola laba. Akibatnya adalah kinerja perusahaan belum mampu menunjukkan kinerja yang baik.

### **e. Beban Perusahaan**

Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama perusahaan tetap beroperasi. Beban ini sebagai penanding bagi pendapatan perusahaan, dimana jika beban perusahaan lebih tinggi dari pendapatan maka perusahaan menderita kerugian, dan jika beban lebih kecil dari pendapatan maka perusahaan mengalami keuntungan.



## 2. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah laba yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu disusun laporan keuangan pada suatu usaha.

Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada catatan transaksi yang terjadi selama periode tertentu yang dimulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dengan menggunakan dasar akrual yaitu catatan transaksi-transaksi atau mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya dan bukan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian usaha mikro kecil dan menengah sejauh ini dapat melakukan pembukuan, dimana pembukuan yang dibuat berisi uang masuk dan uang keluar yang digunakan untuk proses penjualan dengan tujuan untuk mengetahui laba usaha. Adapun penyusunan laporan keuangan pada UD. FFI Sadel adalah sebagai berikut:

Berikut kondisi keuangan UD. FFI Sadel selama bulan januari 2018.

**Tabel 4.1**  
**UD. FFI Sadel Neraca**  
**Per 1 Januari 2018**

Asset		Kewajiban dan Modal		
Asset Lancar		Kewajiban		
Kas di tangan		30.000.000	Utang Usaha	66.000.000
Kas di bank		300.000.000	Utang Bank	0
Piutang Usaha		5.000.000	Jumlah Kewajiban	66.000.000
Persediaan		55.000.000		
Jumlah Asset Lancar		390.000.000	Modal	
			Modal FFI Sadel	629.500.000
Asset Tetap			Laba periode berjalan	0
Tanah		100.000.000		
Bangunan	142.750.000			
Akumulasi Penyusutan Bangunan	7.250.000			
		135.500.000		
Kendaraan	70.250.000			
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	9.750.000			
		60.500.000		
Peralatan	10.000.000			
Akumulasi Penyusutan Peralatan	500.000			
		9.500.000		
Jumlah Asset Tetap		305.500.000		
Jumlah Asset		695.500.000	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	695.500.000

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian keuangan, laporan keuangan yang disusun oleh UD. FFI Sadel menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan UD.FFI Sadel telah membuat susunan laporan keuangan mulai dari transaksi harian berupa (pembelian, penjualan, dan beban) membuat jurnal kemudian memposting ke buku besar. Hal ini sudah sesuai dengan yang di isyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

#### **a. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode tertentu (weygandt: 2007). Laporan laba rugi, memberikan informasi mengenai kinerja entitas untuk periode tertentu, dalam penyajiannya pendapatan disajikan pertama kali kemudian diikuti dengan beban, terakhir laba (rugi) bersih dihitung setelah pengurangan dari pajak. Berikut ini adalah penyajian laporan laba-rugi usaha mikro kecil dan menengah UD. FFI Sadel.

**TABEL 4.2**  
**Laporan Laba Rugi UD. FFI Sadel**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Januari 2018**

Penjualan		214.250.000
Retur Penjualan		0
Pendapatan Bersih		214.500.000
Persediaan Awal	55.000.000	
Pembelian	197.750.000	
Persediaan Akhir	86.000.000	
Retur Pembelian	0	
Beban Pokok Penjualan		166.750.000
Laba Kotor		47.750.000
Beban Gaji	12.000.000	
Beban Transportasi/Angkut	3.000.000	
Beban Uang Makan	1.800.000	
Beban Asuransi	500.000	
Beban Kehadiran/Absensi	1.500.000	
Beban Listrik & Telepon	750.000	
		19.550.000
Laba sebelum pajak		28.200.000
Pajak PPH		0
Laba bersih		28.200.000

Sumber Data : Sudah Diolah

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a). Pendapatan.

- (b). Beban Keuangan.
- (c). Bagian laba atau rugi dari investasi yang metode ekuitas.
- (d). Beban Pajak.
- (e). Laba atau rugi neto.

Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang dibuat oleh UD. FFI Sadel yang sudah mencakupi dari syarat laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi yang disusun oleh UD. FFI Sadel sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

**b. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas pemilik melaporkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu. Berikut ini adalah penyajian laporan perubahan ekuitas pemilik usaha mikro kecil dan menengah UD. FFI Sadel

**TABEL 4.3**  
**Laporan Perubahan Ekuitas UD. FFI Sadel**  
**31 Januari 2018**

Modal Pemilik	629.500.000
Laba bersih	28.200.000
Modal Pemilik 31 januari 2018	657.700.000

Sumber Data : Sudah Diolah

Berdasarkan Laporan keuangan berupa laporan perubahan ekuitas yang disusun oleh UD. FFI Sadel sudah sesuai dengan yang diisyaratkan sesuai dengan informasi yang disajikan dilaporan perubahan ekuitas dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 6.4.

### **c. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan kas dan pembayaran-pembayaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas melaporkan:

- (1) pengaruh kas dari aktifitas operasi selama satu periode,
- (2) transaksi investasi,
- (3) transaksi-transaksi pendanaan.

Laporan arus kas disusun dimana arus kas dari aktifitas operasi ditentukan dengan mengkonversi pos-pos dalam laporan laba rugi dari dasar akrual menjadi dasar kas. Berikut ini adalah laporan arus kas usaha mikro kecil dan menengah UD. FFI Sadel.

**TABEL 4.4**  
**Laporan Arus Kas UD. FFI Sadel**  
**31 Januari 2018**

Arus kas masuk		
Penjualan tunai	180.250.000	
Pelunasan piutang	27.100.000	
Pendapatan lain-lain	0	
Investasi pemilik	0	
Total arus kas masuk		207.125.000
Arus kas keluar		
Pembelian tunai	0	
Beban	19.550.000	
Pembayaran utang	0	
Pengambilan prive	0	
		19.550.000
		187.575.000
Saldo kas 01/01/2018		30.000.000
Saldo kas 31/01/2018		217.575.000

Sumber Data : Sudah Diolah

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraf 7.8 mensyaratkan entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dalam laporan keuangan berupa laporan arus kas yang disusun oleh UD. FFI Sadel sudah menggunakan metode tidak langsung, jadi berdasarkan analisis sudah sesuai dengan yang

di isyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

#### **d. Neraca**

Neraca dapat dikatakan seimbang apabila asset perusahaan jumlahnya sama dengan utang ditambah modal ( $\text{asset} = \text{utang} + \text{modal}$ ). Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, kewajiban dan modal. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Modal terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor. Berdasarkan neraca yang disajikan dalam laporan keuangan UD. FFI Sadel sudah sesuai dengan yang diisyaratkan oleh SAK ETAP sesuai dengan informasi yang disajikan dalam neraca pada paragraf 4.2.

Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah UD. FFI Sadel.



**TABEL 4.5**  
**UD. FFI Sadel Neraca Per 31 Januari 2018**

Asset		Kewajiban dan Modal		
Asset Lancar			Kewajiban	
Kas ditangan		217.575.000	Utang Usaha	41.000.000
Kas dibank		87.575.000	Utang Bank	0
Piutang Usaha		1.800.000	Jumlah Kewajiban	41.000.000
Persediaan Akhir		86.250.000		
Jumlah Asset Lancar		393.200.000	Modal	
			Modal FFI Sadel	629.500.000
Asset Tetap			Laba periode berjalan	28.200.000
Peralatan	10.000.000		Jumlah Modal	657.700.000
Akumulasi penyusutan peralatan	500.000			
		9.500.000		
Tanah		100.000.000		
Bangunan	142.750.000			
Akumulasi penyusutan bangunan	7.250.000			
		135.500.000		
Kendaraan	70.250.000			
Akumulasi penyusutan kendaraan	9.750.000			
		60.500.000		
Jumlah Asset Tetap		305.500.000		
Jumlah Asset		698.700.000	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	698.700.000

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan UD. FFI Sadel. Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Neraca yang disusun oleh UD. FFI Sadel untuk pengakuan atas aset lancar berupa kas dan kas Dibank serta aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Metode yang digunakan dalam penyusutan bangunan dan peralatan menggunakan metode garis lurus. Jadi neraca yang dibuat oleh UD. FFI Sadel sudah sesuai dengan SAK ETAP.
2. Laporan Laba-rugi yang disusun oleh UD. FFI Sadel dalam laporan keuangannya tidak mencantumkan pos beban pajak, sehingga laba yang diperoleh terlalu tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan SAK ETAP.

3. Laporan Perubahan Ekuitas, entitas menyajikan saldo laba akhir setelah ada perubahan saldo laba pada awal periode jadi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
4. Laporan Arus Kas, entitas menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan penghasilan utama pendapatan dari penjualan tunai dan penjualan kredit selama satu periode dengan menggunakan metode tidak langsung. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP
5. UD. FFI Sadel belum melengkapi laporan keuangannya dengan Catatan Atas Laporan Keuangan jadi tidak sesuai dengan SAK ETAP.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada UD. FFI Sadel adalah agar melaporkan beban pajak pada laporan laba rugi dan melengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Sehingga sesuai dengan apa yang telah di syaratkan dalam SAK ETAP.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifudin. Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Armando, Z. R. (2014). “Eksplorasi dan Remodelling Akuntansi pada Usaha Mikro dan Kecil. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang..

Arri Alfitri, Ngadiman, Sohidin. (2014). “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Godangsari”.

Faridah, Titik. (2015). “Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan (SAK ETAP). (Studi Kasus pada Multi Jaya Atsiri dan UD. Wijaya Kusuma di Blitar)”.

Fifin Baitul Ulum. (2015). “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis SAK ETAP. (Studi Kasus pada UD. Tahu Jamhari)”.

Floren Violetfin Leries, Fefri Indra Arza, Citra Ramayani. (2013). “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). (Studi Kasus pada CV. Citra Pandion Bernas di Kabupaten Solok)”.

Furqon, Andi Chairil. (2012). “Problematika Praktik Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Serta Keterkaitannya Terhadap Akses Kredit”. (Online) [balitbang.sulteng.go.id](http://balitbang.sulteng.go.id). diakses 5 Mei 2013.

Harahap, Sofyan Syafri. (2007). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Penerbitan Salemba Empat: Jakarta.

Jusuf, Al Haryono. (2010). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Edisi 7, Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.

Milles, M.B. and Hubberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London Sage Publication.

Mujairimi. (2014). Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Prima Akses Madura Pamengkasan.

Pinasti, M. (2001). Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*. Vol 3. No. 1. Pp. 10-17.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rudianto. (2009) Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

Saptantinah, Dewi (2010). “Perlunya Penerapan Sistem Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Bengkel Aksesoris dan Variasi Goro Profesional di Jalan Bayangkara, Solo)”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Solo.

Sri Ernawati, Jumirin, Asyikin, Octavia Sari. (2016). “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dasar Pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin”.

Sri Yunawati, Arma Yuliza, Dinarti. (2015). “Studi Penerapan Pencatatan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). (Studi Kasus pada Usaha Warnet di Kota Tengah)”.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Mei (2016). Penerbit: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Cetakan Ketiga Oktober (2013). Penerbitan: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sugiono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suhairi. (2004). “*Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage and Performance: A Researchon Entrepreneurship of Indonesia Medium Industries*”. *Disertasi, USM Malaysia*.

Sulistiawan, Dedhy dan Feliana, Yieke. (2006). Akuntansi Keuangan Menengah 1. Edisi Pertama. Malang: Bayumedia Publishing.

Suryana. (2001). Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan). Jakarta : Salemba Empat

Wira. (2012). “Perbedaan SAK ETAP VS PSAK-IFRS” (<http://sagalawira92.blogspot.com>) diakses tanggal 14 Agustus 2018.

**STIE Widya Wiwana  
Jangan Plagiat**